



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : III
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA)
PRT
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Kamis, 31 Maret 2011
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Acara : Audiensi/penerimaan aspirasi
Ketua Rapat : Ir. Aziz Suseno, MT/Ketua Pokja Nakertrans Komisi IX DPR
RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I
Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : 8 orang dari 24 Anggota Pokja NakertransKomisi IX DPRRI,
izin 2 Anggota.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dibuka pukul 14.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. RDPU Komisi IX DPR RI dengan Jaringan Nasional Advokasi (JALA) PRT sebelumnya telah 2 kali dilaksanakan yaitu pada tanggal 12 Nopember 2009 dan pada tanggal 3 Juni 2010 yang lalu.
2. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA) PRT menyampaikan keprihatinan terkait belum dibahasnya RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga oleh Komisi IX DPR RI, mengusulkan agar RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dibahas secara paralel dengan pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

3. CEDAW Working Group Initiative mengharapkan agar RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera dibahas. Terwujudnya undang-undang ini merupakan hal penting untuk membuktikan bahwa Negara serius melindungi pekerja rumah tangganya baik di dalam maupun luar negeri, hal ini seharusnya menjadi *concern* dari Anggota Komisi IX DPR RI.
4. KASBI berpendapat bahwa sistem ketenagakerjaan yang selama ini terbangun menyebabkan terjadinya pengangguran dan kemiskinan. PRT sering mengalami penindasan, penghisapan, penganiayaan hingga pembunuhan. Maka dengan terhambatnya pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, KASBI melihat belum adanya keseriusan dari DPR untuk melindungi kesejahteraan buruh.
5. Federasi SPSI Reformasi mengharapkan agar sektor PRT diakui sebagai pekerja. PRT sudah sepatutnya mendapat perlindungan karena pekerjaan yang dilakukan menyita waktu penuh (*full time*), yang menyebabkan sebagian hak-hak mereka hilang untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Hak-hak PRT yang diperjuangkan adalah pemenuhan HAM secara umum yang seharusnya didukung oleh Anggota DPR.
6. Federasi SPSI Reformasi mengharapkan agar RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disahkan pada tahun 2011, karena dengan pengesahan RUU tersebut akan berdampak positif terhadap perlindungan PRT migran di luar negeri, karena Negara penerima PRT akan berupaya memenuhi standard yang telah diatur dalam UU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan pemerintah Indonesia akan mempunyai posisi tawar yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran dengan Negara penerima TKI.
7. Gema Perempuan menyampaikan hak-hak anak yang bekerja sebagai PRT Anak, dari total PRT, 25% adalah PRT anak, pada tahun 2005 PRT anak yang mengalami pelecehan seksual dan trafficking mencapai 40%. Gema Perempuan mengharapkan perhatian dari berbagai pihak atas keberadaan PRT anak dan mendesak dihapuskannya PRT Anak, karena hal tersebut menghilangkan hak mereka sebagai anak.
8. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengharapkan agar Anggota Komisi IX mempunyai komitmen untuk memperjuangkan pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, sehingga diharapkan tidak ada lagi penindasan yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga Indonesia.
9. LBH Apik menyampaikan bahwa banyaknya kasus-kasus yang menimpa pekerja rumah tangga karena PRT tidak mempunyai payung hukum. Oleh karena itu mendesak agar Komisi IX DPR RI membahas dan mensahkan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan membuka ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan dalam pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. LBH Apik juga mendukung dibahasnya RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Luar Negeri.

10. Komisi IX DPR RI mempunyai komitmen untuk membahas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun LSM yang terkait dengan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga harus aktif mendesak dan mengingatkan Anggota DPR dari berbagai fraksi, sehingga fraksi-fraksi di Komisi IX DPR RI mempunyai pemahaman yang sama dalam mempercepat pembahasan RUU tentang PPRT.

III. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi terhadap beberapa aspirasi yang disampaikan oleh JALA PRT, CEDAW Working Group Initiative, Kasbi, F.SPSI Reformasi, Gema Perempuan, SBMI dan LBH Apik, aspirasi tersebut akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

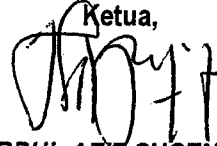
Catatan :

Anggota Komisi IX DPR RI yang hadir berkomitmen untuk memperjuangkan pembahasan RUU tentang PPRT.

Rapat diakhiri pukul 15.25 WIB

POKJA NAKERTRANS KOMISI IX DPR RI

Ketua,



Ir. ABDUL AZIZ SUSENO, MT